

**RENJA - SKPD
DINAS SOSIAL
TAHUN 2019**



**Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Kamboja No. 3 Kandangan 71212, Telpon/Fax (0517) 21123**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Sekretariat	5
Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Pemberdayaan Sosial	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	7
Tabel 2.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 pada Bidang Perlindungan Sosial	8
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017.....	9
Tabel 2.6 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	16
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019.....	24
Tabel 3.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjadi dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kab. HSS.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan di bidang sosial tahun lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menterjemahkan secara teknis pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS;
- b. Menyusun perencanaan pembangunan yang lebih fungsional dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang sosial baik secara internal maupun eksternal;
- e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja bidang sosial;

- f. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Sosial Kab. HSS;
- b. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan, keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD; analisis kinerja pelayanan SKPD; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; Review terhadap rancangan awal RKPDP; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.

BAB IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja SKPD Tahun 2017 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun lalu dari 34 kegiatan yang direncanakan terdapat 34 kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017.

Pada Perubahan Renja Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, merupakan kegiatan yang mengakomodir operasional kegiatan dan peningkatan kapasitas kompetensi pendamping PKH, petugas PBI JKN dan petugas SLRT.

Untuk capaian realisasi program dan kegiatan TA. 2017 yang diambil dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2017 Tanggal 31 Desember 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
pada SEKRETARIAT

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.656.799.000	2.958.657.836	80,91	100
	1. Gaji dan Tunjangan	1.970.074.000	1.699.634.500	86,27	100
	2. Tambahan Penghasilan	1.686.725.000	1.259.023.336	74,64	100
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.770.000	1.951.000	70,43	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.442.000	59.338.128	56,28	100
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16.250.000	5.584.200	34,36	100
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	11.000.000	100	100
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15.050.000	15.050.000	100	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.307.850	47.139.100	99,64	100
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.825.360	8.760.560	80,93	100
	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.409.000	3.409.000	100	100
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.914.825	171.514.825	96,95	100
	10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	3.850.000	80,21	100
	11. Penyediaan Makanan dan Minuman	13.332.000	13.332.000	100	100
	12. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	320.000.000	318.195.753	99,44	100
	13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	67.700.000	65.165.000	96,26	100
	14. Kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	59.230.000	98,72	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pembangunan Gedung Kantor	65.974.000	65.835.000	99,79	100
	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	35.610.000	35.610.000	100	100
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72.880.000	66.100.000	90,70	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.052.000	6.052.000	100	100
	JUMLAH	4.692.116.035	3.915.774.402	83,45	100

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	1. Kegiatan Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	39.695.000	39.150.000	98,63	100
	2. Kegiatan Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	299.483.080	297.702.280	99,41	100
	3. Kegiatan Koordinasi Program Rumah Sejahtera	243.404.250	239.404.250	98,36	100
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	356.436.000	323.786.000	90,84	100
JUMLAH		939.018.330	900.042.530	95,85	100

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Miskin dan Terlantar	23.116.000	22.566.000	97,62	100
	2. Penyediaan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	187.690.000	182.790.000	97,39	100
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar				
	1. Kegiatan Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	188.788.000	180.128.000	95,41	100
	2. Peningkatan Pelayanan Sosial terhadap Anak	24.410.000	21.405.000	87,69	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	111.292.000	107.230.900	96,35	100
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				
	1. Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	81.908.000	76.008.000	92,80	100
	2. Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	111.050.000	73.117.500	65,84	100
JUMLAH		728.254.000	663.245.400,00	91,07	100

Tabel 2.4

**Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017
Pada BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana	114.269.000,00	89.891.000,00	78,67	100
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Peningkatan Peran Aktif Organisasi dan Relawan Penanggulangan Bencana	547.770.000	544.395.000	99,38	100
	2. Pembinaan, Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	165.186.000	148.236.000	89,74	100
	3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	221.400.000	213.275.000	96,31	100
JUMLAH		1.048.665.000	995.797.000	94,96	100

Terdapatnya sisa anggaran tersebut berkenaan dengan adanya penghematan dari proses pengadaan barang dan jasa serta adanya perubahan regulasi dalam memperoleh bantuan sosial.

Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2017 %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	83,41	77,15	92,49
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	52,02	52,02	100
3	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	100	111
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	100	111
5	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	6,25	6,25	100
6	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	25	25	100
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27	57,45	270
8	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20	20	100
9	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100	100	100
10	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50	0	0
11	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100	100	100
12	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100	100	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83,22	104
14	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100	100	100
15	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB	100
16	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Sosial Kab. HSS umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat dua sasaran renstra yang belum tercapai.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang belum mencapai target yaitu :

1. **Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya**, target belum tercapai dikarenakan adanya pengurangan kouta penerima Beras Sejahtera (Rastra) dari Kemensos RI dari target yang telah ditetapkan yaitu dari 15.238 KK menjadi 13.703 KK. Selain itu juga karena ada beberapa penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi serta belum mampu menjalankan UEP dengan baik.
2. **Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya**, target belum tercapai dikarenakan memang tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang dilaporkan ke Dinas Sosial Kab. HSS.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Kab. HSS pada tahun 2017 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing bidang.

I. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada SEKRETARIAT

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan rekening telepon, air, listrik dan internet kantor.
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service 16 buah kendaraan dinas selama satu tahun.
 - d. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah berhasil menyediakan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
 - e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun.
 - f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun.
 - g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor selama satu tahun.

- h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
 - i. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan bahan bacaan kantor (surat kabar).
 - j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
 - k. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
 - l. Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan jasa non PNS.
 - m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan pembangunan gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan pembangunan selasar gedung kantor pada Dinas Sosial Kab. HSS.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan penataan ruang kerja dan pengecatan gedung kantor, pemeliharaan perbaikan toilet gedung II Dinas Sosial Kab. HSS.
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil dilaksanakan service untuk 5 buah kendaraan dinas/operasional dan penggantian suku cadang untuk 2 buah kendaraan dinas, serta pembayaran BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional yaitu mobil Kepala Dinas, mobil pick up logistik, mobil tangki air, mobil RTU, mobil dapur umum dan speedboat.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil dilaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun yaitu Revisi Renstra, Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Prognosis dan Laporan Keuangan.

II. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :
 - a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, telah berhasil meningkatkan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 86 orang dan memfasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran- Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
 - b. Pendampingan usaha bagi keluarga miskin, telah berhasil memberikan fasilitasi bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 123 KK yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	4		4
KECAMATAN DAHA BARAT	3		3
KECAMATAN DAHA SELATAN	7		7
KECAMATAN DAHA UTARA	2	4	6
KECAMATAN KALUMPANG	21		21
KECAMATAN KANDANGAN	29	2	31
KECAMATAN LOKSADO	13		13
KECAMATAN PADANG BATUNG	11	1	12
KECAMATAN SIMPUR	5	1	6
KECAMATAN SUNGAI RAYA	11		11
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	9		9
JUMLAH	115	8	123

- c. Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin, telah berhasil memberikan fasilitasi bantuan beras sejahtera secara gratis kepada keluarga miskin sesuai dengan peruntukannya yang diberikan setiap bulan kepada sebanyak 13.703 KK.
 - d. Koordinasi program rumah sejahtera, telah berhasil memberikan fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 761 buah terdiri dari 463 buah melalui anggaran murni dan 298 buah melalui anggaran perubahan yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan data sebagai berikut :

KECAMATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL
KECAMATAN ANGKINANG	108	11	119
KECAMATAN DAHA BARAT	-	45	45
KECAMATAN DAHA SELATAN	30	14	44
KECAMATAN DAHA UTARA	15	7	22
KECAMATAN KALUMPANG	-	38	38
KECAMATAN KANDANGAN	-	17	17
KECAMATAN LOKSADO	-	31	31
KECAMATAN PADANG BATUNG	-	80	80
KECAMATAN SIMPUR	-	26	26
KECAMATAN SUNGAI RAYA	63	22	85
KECAMATAN TELAGA LANGSAT	247	7	254
JUMLAH	463	298	761

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, telah berhasil melaksanakan pembinaan 8 jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari :
 - Lembaga/organisasi sosial yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 14 buah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 buah, Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial (K3S) 1 buah, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5 buah.
 - Relawan sosial yang aktif yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 11 orang, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 5 orang.
 - b. Peningkatan kesetiakawanan sosial masyarakat, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Nasional.

III. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Lansia.

- b. Penyediaan bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), telah berhasil memberikan fasilitasi :
- Penyaluran bantuan sosial Bersama Peduli Anak Yatim (BERUPAYA) sebesar Rp.1.200.000,00/orang/tahun kepada sebanyak 648 anak;
 - Penyaluran bantuan sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebesar Rp.1.200.000,00/orang/tahun kepada sebanyak 99 anak dari keluarga miskin;
 - Penyaluran bantuan sosial untuk lanjut usia miskin dan terlantar yaitu Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia) sebesar Rp.2.700.000,00/orang/tahun yang diberikan 2 tahap dalam setahun kepada sebanyak 1.971 orang dan pemberian bantuan sembako untuk lansia sebanyak 200 orang.
 - Pemberian bantuan sembako kepada 160 orang penyandang disabilitas.
2. Program pembinaan anak terlantar, yang terdiri dari kegiatan :
- a. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar, telah berhasil mengirim 40 orang anak terlantar untuk dibina pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Banjarbaru dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pembinaan bakat dan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti terdiri dari : Bahan dan peralatan menjahit, tata rias, service hp, service sepeda motor, kelengkapan/peralatan komputer, kelengkapan/peralatan otomotif, peralatan usaha meubel aluminium.
 - b. Peningkatan pelayanan sosial terhadap anak, telah berhasil dilaksanakan peringatan Hari Anak Nasional dan bantuan perlengkapan sekolah kepada 6 orang anak, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk 12 anak, pendampingan adopsi anak ada 6 kasus dan advokasi ada 8 kasus.
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, terdiri dari kegiatan :
- a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, telah berhasil dilaksanakan :
 - Pemberian bantuan alat bantu tubuh kepada 7 orang penyandang disabilitas dari keluarga miskin terdiri dari : kursi roda, tongkat ketiak/kruk, kaki palsu/prothese;
 - Pelatihan Praktek Belajar Kerja bagi penyandang disabilitas sebanyak 10 orang dan bantuan barang modal usaha kepada sebanyak 8 orang terdiri dari : bahan dan peralatan menjahit, bahan dan peralatan pijat, bahan dan peralatan service sepeda motor;

- Assesment sebanyak 9 orang penyandang disabilitas dan pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 2 orang.
4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), terdiri dari kegiatan :
- a. Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar, telah berhasil dilaksanakan penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial sesuai kasus/masalah sosial yang terjadi sebanyak 22 orang, penertiban gelandangan dan pengemis sebanyak 22 orang.
 - b. Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, telah berhasil dilakukan :
 - Bimbingan kewirausahaan berupa bimbingan motivasi dan praktek membuat kue kepada perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 20 orang;
 - Seleksi calon siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 20 orang;
 - Pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 10 orang dan pemberian bantuan peralatan modal usaha kepada 10 orang setelah selesai mengikuti pembinaan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti terdiri dari : bahan dan peralatan tata rias, tata boga, tata busana/menjahit.

IV. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
 - a. Perlindungan sosial bagi korban bencana, telah berhasil dilaksanakan :
 - Penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan bahan makanan dan peralatan dapur terhadap korban bencana sebanyak 496 jiwa/154 KK dari 38 kejadian bencana yaitu :
 - Kebakaran 27 kejadian, korban 92 jiwa/37 KK;
 - Banjir 6 kejadian, korban 379 jiwa/111 KK;
 - Puting Beliung 2 kejadian, korban 11 jiwa/2 KK;
 - Pohon tumbang 3 kejadian, korban 14 jiwa/4 KK.
 - Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana seperti sarana mobilitas roda 4 dan roda 2, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
- a. Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan, telah berhasil dilaksanakan :
 - Pemberian santunan/bantuan sosial berupa tali asih kepada 104 orang veteran dan janda veteran yang diberikan 3 kali dalam setahun yaitu pada peringatan 17 Mei, 17 Agustus dan 10 November;
 - Fasilitasi untuk pemakaman veteran dan fasilitasi ziarah ke Makam tokoh/pahlawan.
 - b. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, telah berhasil dilaksanakan fasilitasi pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pengecatan, pembangunan Pagar dan Portal Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Banua.
 - c. Peningkatan peran aktif organisasi dan relawan penanggulangan bencana, telah berhasil dilaksanakan Pemantapan petugas Siaga Bencana dalam hal ini Taruna Siaga Bencana, piket posko kebencanaan di Markas Komando Tagana serta pemberian insentif bagi Taruna Siaga Bencana guna meningkatkan kinerja Taruna Siaga Bencana (Tagana).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Kajian terhadap Visi Misi Kabupaten dan Kajian terhadap Renstra K/L, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Isu-isu strategis Dinas Sosial berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan; 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kemiskinan di Kab. HSS tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi KalSel tahun 2013 sebesar 4,76 %. Untuk itu kesejahteraan masyarakat Kab. HSS perlu ditingkatkan guna

<p>Taman Makam Pahlawan.</p>	<p>kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rahabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan;</p> <p>5. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksanan Teknis Dinas;</p> <p>6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.</p>	<p>menurunkan angka kemiskinan;</p> <p>2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan karena sangat dibutuhkan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;</p> <p>3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan;</p> <p>4. Nilai-nilai kepahlawanan perlu dilestarikan agar pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat tidak melunturkan rasa patriotisme, semangat juang ,semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang;</p> <p>5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang</p>
------------------------------	---	--

		sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.
--	--	---

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain adalah:

- Semakin meningkatnya permasalahan sosial yang ada sementara program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang ada.
- Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal dalam pelaksanaan program/kegiatan.
- Masih terbatasnya data dan informasi, aspek perencanaan serta sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan pembangunan bidang sosial.
- Masih terbatasnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang sosial.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan solusi dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas.
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.
- Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan bidang sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terpola pada satu tujuan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, terarah, terencana serta berkesinambungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

RKPD yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan dan sinkronisasi data masukan dari kondisi tertentu dan semua Rencana Kerja SKPD yang memuat kegiatan dan program serta kerangka anggaran SKPD.

Pada Renja Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tanaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
- Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Keuangan
- Penyusunan Dokumen AKIP

4. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari kegiatan :

- Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah
- Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin
- Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan

5. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari kegiatan :

- Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin
- Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar

-	Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
-	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas
-	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :
-	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar
-	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
-	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar
-	Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
-	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
-	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
-	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya
7.	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terdiri dari kegiatan :
-	Perlindungan Sosial Korban Bencana
-	Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar
-	Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
-	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin
8.	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terdiri dari kegiatan :
-	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang yang ada pada Dinas Sosial Kab. HSS dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan 3 (tiga) program dengan 15 (lima belas) kegiatan;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, melaksanakan 2 (dua) program dengan 6 (enam) kegiatan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, melaksanakan 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan;
- e. Bidang Perlindungan Sosial, melaksanakan 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses sebagai berikut :

1. Musrenbang Tingkat Desa,
2. Musrenbang Tingkat Kecamatan,
3. Musrenbang Tingkat Kabupaten,
4. Musrenbang Tingkat Provinsi,
5. Informasi dari masyarakat, PSM, Orsos, Ormas, serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi.
6. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan kegiatan dan programnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kepada pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana dan Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan; dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. HSS

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
- 7) Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kab. HSS sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin;
- 2) Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 3) Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
- 4) Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
- 5) Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
- 6) Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);

- 7) Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
- 8) Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
- 9) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 10) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Revisi Rencana Strategis Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2014-2018 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kinerja Program/Kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun Anggaran 2019;
- c. Menciptakan sinergitas perencanaan, kepastian, keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Sosial Kab. HSS.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Tercapainya pelaksanaan tugas bagi semua personil untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pembangunan sosial sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b. Tersedianya kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial;
- c. Tersedianya informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja Dinas Sosial Kab. HSS;
- d. Terkendalinya kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan upaya kesejahteraan dan pembangunan bidang sosial secara internal maupun eksternal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
0	Non Urusan					
0 0	-					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	01 Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	85.769.500	APBD II
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	93.602.000	APBD II
	05 Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	14.000.000	APBD II
	06 Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	23.612.500	APBD II
	08 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	130.150.000	APBD II
	09 Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Dinas Sosial	1 Tahun	367.000.000	APBD II
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Dinas Sosial	1 Tahun	130.917.800	APBD II
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor kondisi baik	Dinas Sosial	1 Tahun	103.700.000	APBD II

		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Dinas Sosial	1 Tahun	146.600.000	APBD II
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	Dinas Sosial	1 Tahun	229.400.000	APBD II
	7		Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		07	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dinas Sosial	12 Dokumen Keuangan	5.000.000	APBD II
		08	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dinas Sosial	15 Dokumen AKIP	5.000.000	APBD II
	10		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah					
		02	Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	Jumlah peringatan yang dilaksanakan	Dinas Sosial	4 Peringatan	71.106.000	APBD II
		21	Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin	Jumlah Basis Data Terpadu kemiskinan yang terverifikasi dan validasi sesuai ketentuan	Dinas Sosial	1 Aplikasi	898.509.200	APBD II
		22	Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah pelayanan administrasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	Dinas Sosial	9 Jenis PSKS	5.019.726.000	APBD II
		23	Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	Dinas Sosial	4 Lomba	34.769.000	APBD II
		24	Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Dinas Sosial	1 Lokasi	193.992.500	APBD II
				Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial		94 Orang		

1	7	1		Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
			01	Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. HSS	130 Orang	53.608.000	APBD II
			02	Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. HSS	23 Orang	61.100.000	APBD II
			03	Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. HSS	20 Orang	110.810.000	APBD II
					Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan		100 Orang		
			04	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kab. HSS	8 Orang	25.100.000	APBD II
			05	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar	Kab. HSS	1 Dokumen (100 buah rumah)	97.310.000	APBD II
1	7	2		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
			15	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Kab. HSS	67 Orang	114.620.000	APBD II
					Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar		100 %		

		16	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Kab. HSS	215 Orang	93.895.000	APBD II
		17	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	Kab. HSS	100 %	122.320.000	APBD II
				Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial		90 %		
		18	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	Kab. HSS	7 Orang	122.953.000	APBD II
				Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja		10 Orang		
				Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu tubuh		12 Orang		
		19	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	Kab. HSS	20 Orang	31.158.000	APBD II
		20	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya	Jumlah penyandang penyakit sosial lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Kab. HSS	93 Orang	46.100.000	APBD II
		29	Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	Kab. HSS	160 Orang	61.100.000	APBD II

1	7	3		Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
			02	Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Kab. HSS	950 Orang	18.300.000	APBD II
			03	Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Kab. HSS	2.347 Orang	36.100.000	APBD II
			04	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera dari Daerah	Kab. HSS	5.016 KPM	228.096.500	APBD II
			09	Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana	Kab. HSS	100 %	174.744.000	APBD II
					Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial		100 %		
1	7	4		Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					
			01	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah lembaga/organisasi sosial yang dibina dan aktif	Kab. HSS	58 Buah	135.970.000	APBD II
					Jumlah relawan/petugas sosial yang dibina dan aktif	Kab. HSS	269 Orang		APBD II
JUMLAH TOTAL ANGGARAN								9.086.139.000	

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS Tahun Anggaran 2019 seperti pada tabel di atas terdapat 8 (delapan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan masing-masing indikator dan targetnya. Untuk Sekretariat terdapat 4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan, dan untuk bidang-bidang terdapat 4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kab. HSS yang dibuat selaras dengan RPJMD Tahun 2019-2023.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran TA. 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019
1.	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase angka PMKS yang mandiri	55%
2.	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	56 %
3.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	A

BAB IV PENUTUP

Secara spesifik Rencana Kerja (Renja) 2019 merupakan kelanjutan yang ditopang dengan Renja terdahulu yang fokus pada target baik agenda, strategi, kebijakan maupun kegiatan. Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. HSS ini berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk menterjemahkan secara teknis pelaksanaan RPJP dan RPJMD Kab. HSS. Untuk itu diperlukan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja. Apabila ada masukan dan kritik yang sifatnya konstruktif akan diterjemahkan dalam program-program yang diusulkan. Hal ini untuk mendorong proses penyusunan program yang transparan, dan munculnya kesadaran untuk mengawasi proses penyusunan serta implementasi program dari masyarakat.

Dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menerapkan prinsi-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mendorong keberhasilan pembangunan bidang sosial, Rencana Kerja ini menggunakan indikator-indikator yang terukur, sekaligus sebagai acuan dan kontrol terhadap semua kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi Dinas Sosial Kab. HSS.

Keberhasilan Rencana Kerja ini memerlukan dukungan dan kerja keras semua pihak baik lintas SKPD, legislatif dan masyarakat. Akhirnya, semoga Renja ini dapat menjadi bahan penyusunan program-program pembangunan daerah dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kandangan, 5 Juli 2018

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			0			Non Urusan							
			0	0		-							
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 Indeks	714.134.000		0 Indeks	
			0	0	1	1 Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	85.769.500	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	93.602.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	1	5 Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Kabupaten	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	14.000.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	1	6 Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	23.612.500	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	1	8 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya	SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	130.150.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	1	9 Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	367.000.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 Indeks	610.617.800		0 Indeks	
			0	0	2	14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	1 Tahun	130.917.800	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor kondisi baik	1 Tahun	103.700.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	1 Tahun	146.600.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0
			0	0	2	31 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	1 Tahun	229.400.000	Pendapatan Daerah	0 Tahun	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			0 0 7	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah	100 %;100 %	10.000.000			0 %;0 %	
			0 0 7 7	Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Dokumen keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen Keuangan	5.000.000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen Keuangan	0
			0 0 7 8	Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Dokumen AKIP	5.000.000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen AKIP	0
			0 0 10	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan	82 Indeks	6.218.102.700			0 Indeks	
			0 0 10 2	Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah	Kabupaten	Jumlah peringatan yang dilaksanakan	4 Peringatan	71.106.000	Pendapatan Daerah		0 Peringatan	0
			0 0 10 21	Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin	Kabupaten	Jumlah Basis Data Terpadu kemiskinan yang terverifikasi dan validasi sesuai ketentuan	1 Aplikasi	898.509.200	Pendapatan Daerah		0 Aplikasi	0
			0 0 10 22	Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kabupaten	Jumlah pelayanan administrasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	9 Jenis PSKS	5.019.726.000	Pendapatan Daerah		0 Jenis PSKS	0
			0 0 10 23	Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kabupaten	Jumlah lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	4 Lomba	34.769.000	Pendapatan Daerah		0 Lomba	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			0 0 10 24	Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	Kabupaten	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	1 Lokasi	193.992.500	Pendapatan Daerah		0 Lokasi	0
						Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial	94 Orang				0 Orang	
			1		Wajib							
			1 7		Sosial							
2	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mandiri	1 7 1	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Tingkat pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,29 %	347.928.000			0%	
			1 7 1	1 Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin	Kabupaten	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	130 Orang	53.608.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 1	2 Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar	Kabupaten	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	23 Orang	61.100.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 1	3 Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Kabupaten	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	20 Orang	110.810.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
						Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan	100 Orang				0 Orang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1 7 1 4	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	8 Orang	25.100.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 1 5	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera	Kabupaten	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar	1 Dokumen (100 buah rumah)	97.310.000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
			1 7 2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6,02 %;3,54 %	592.146.000			0 %;0 %	
			1 7 2 15	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	Kabupaten	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	67 orang	114.620.000	Pendapatan Daerah		0 orang	0
						Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar	100%				0%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1 7 2 16	Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar	Kabupaten	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	215 Orang	93.895.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 2 17	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar	Kabupaten	Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	122.320.000	Pendapatan Daerah		0%	0
						Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	90%				0%	
			1 7 2 18	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	7 Orang	122.953.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
						Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja	10 Orang				0 Orang	
						Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu tubuh	12 Orang				0 Orang	
			1 7 2 19	Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Kabupaten	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	20 Orang	31.158.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1 7 2	20 Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya	Kabupaten	Jumlah penyandang penyakit sosial lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	93 Orang	46.100.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 2	29 Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Kabupaten	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	160 Orang	61.100.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 3	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	63%	457.240.500			0%	
			1 7 3	2 Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar	Kabupaten	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	950 Orang	18.300.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 3	3 Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	2.347 Orang	36.100.000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
			1 7 3	4 Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin	Kabupaten	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera dari Daerah	5.016 KPM	228.096.500	Pendapatan Daerah		0 KPM	0
			1 7 3	9 Perlindungan Sosial Korban Bencana	Kabupaten	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana	100%	174.744.000	Pendapatan Daerah		0%	0
						Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	100%				0%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	1 7 4	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Cakupan Lembaga/Organisasi sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial; Cakupan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial	38,67 %;61,98 %	135.970.000			0 %;0 %	
			1 7 4	1 Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kabupaten	Jumlah lembaga/organisasi sosial yang dibina dan aktif	58 Buah	135.970.000	Pendapatan Daerah		0 Jenis PSKS	0
						Jumlah relawan/petugas sosial yang dibina dan aktif	269 Orang					
TOTAL								9.086.139.000				0

Kandangan, 5 Juli 2018

Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001